



---

# BPBD Kab. Buleleng

---

**RENCANA AKSI ATAS  
PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BPBD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

---

Semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 26 Oktober 2023  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BPBD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Buleleng .....	5
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja .....	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	7
2.2 Indikator dan Target Kinerja.....	7
BAB III PENUTUP .....	9

Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kabupaten Buleleng  
Tahun 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

#### **1.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Buleleng**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang dijabarkan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Kepala Pelaksana
- Sekretaris
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - Substansi Perencanaan
  - Substansi Kepegawaian

- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum

### **1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan**

Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## **BAB II**

### **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

#### **2.2 Indikator dan Target Kinerja**

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

## **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BPBD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

---

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2022 sebagai Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan).



**BAB III**

**PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja perubahan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Buleleng,



**Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P**

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19801212 199912 1 001

**Lampiran**  
**Rencana Aksi Atas**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan 2023**

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
BPBD KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	
<b>ESELON II</b>											
<b>KEPALA PELAKSANA</b>											
1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat dari resiko bencana	Cakupan penanggulangan bencana daerah	%	100	Januari	100	Program Penanggulangan Bencana	<b>1.848.730.401</b>	Januari	209.728.388	
					Pebruari	100			Pebruari	110.890.361	
					Maret	100			Maret	98.511.811	
					April	100			April	215.298.397	
					Mei	100			Mei	109.712.778	
					Juni	100			Juni	13.274.948	
					Juli	100			Juli	313.986.734	
					Agustus	100			Agustus	83.134.925	
					September	100			September	200.824.171	
					Oktober	100			Oktober	293.684.946	
					Nopember	100			Nopember	124.851.295	
					Desember	100			Desember	74.831.647	
					2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas			Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Angka/Nilai	
Pebruari	-	Pebruari	366.859.475								
Maret	-	Maret	366.430.469								
April	-	April	711.264.191								
Mei	-	Mei	421.919.095								
Juni	≥80	Juni	264.207.299								
Juli	-	Juli	470.507.908								
Agustus	-	Agustus	386.637.006								
September	-	September	358.646.684								
Oktober	-	Oktober	457.755.146								
Nopember	-	Nopember	648.775.598								
Desember	≥80	Desember	73.572.098								
<b>Total</b>							<b>6.947.436.845</b>				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Bulan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
<b>ESELON III</b>											
<b>SEKRETARIS</b>											
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP yang baik	Nilai	≥80	Januari	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.098.706.444	Januari	572.131.475	
					Pebruari	-			Pebruari	366.859.475	
					Maret	-			Maret	366.430.469	
					April	-			April	711.264.191	
					Mei	≥80			Mei	421.919.095	
					Juni	-			Juni	264.207.299	
					Juli	-			Juli	470.507.908	
					Agustus	-			Agustus	386.637.006	
					September	-			September	358.646.684	
					Oktober	-			Oktober	457.755.146	
					November	-			November	648.775.598	
					Desember	-			Desember	73.572.098	
		Nilai PMPRB yang baik	Nilai	≥80	Januari	-					
					Pebruari	-					
					Maret	-					
					April	-					
					Mei	-					
					Juni	-					
					Juli	≥80					
					Agustus	-					
					September	-					
					Oktober	-					
					November	-					
					Desember	-					
Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanann	%	100	Januari	100							
			Pebruari	100							
			Maret	100							
			April	100							



		Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	Januari	100					
					Pebruari	100					
					Maret	100					
					April	100					
					Mei	100					
					Juni	100					
					Juli	100					
					Agustus	100					
					September	100					
					Oktober	100					
					November	100					
					Desember	100					
<b>Total</b>							<b>5.098.706.444</b>				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
<b>ESELON III</b>											
<b>KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>											
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang sesuai ketentuan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana sesuai ketentuan	%	100	Januari	100	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	173.172.574	Januari	14.651.768	
					Pebruari	100			Pebruari	13.901.688	
					Maret	100			Maret	15.500.798	
					April	100			April	15.249.298	
					Mei	100			Mei	14.529.548	
					Juni	100			Juni	12.669.948	
					Juli	100			Juli	16.965.038	
					Agustus	100			Agustus	14.540.798	
					September	100			September	14.540.798	
					Oktober	100			Oktober	20.334.475	
					Nopember	100			Nopember	13.018.478	
					Desember	100			Desember	7.269.939	
2	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sesuai ketentuan	laporan	4	Januari	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	62.218.750	Januari	3.523.050	
					Pebruari	-			Pebruari	1.760.000	
					Maret	1			Maret	1.500.000	
					April	-			April	2.497.333	
					Mei	1			Mei	1.500.000	

					Juni	-			Juni	-
					Juli	-			Juli	5.841.817
					Agustus	-			Agustus	1.652.100
					September	1			September	1.652.100
					Oktober	1			Oktober	5.591.600
					Nopember	-			Nopember	36.700.750
					Desember	-			Desember	-
		Persentase Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan sesuai ketentuan	Laporan	4	Januari	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	53.372.100	Januari	1.000.000,00
					Pebruari	-			Pebruari	2.813.250,00
					Maret	-			Maret	8.218.400,00
					April	1			April	13.180.000,00
					Mei	-			Mei	-
					Juni	1			Juni	-
					Juli	-			Juli	8.174.750,00
					Agustus	1			Agustus	700.000,00
					September	-			September	3.472.000,00
					Oktober	-			Oktober	9.312.750,00
					Nopember	1			Nopember	6.500.950,00
					Desember	-			Desember	-
3	Terwujudnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan	Dokumen	5	Januari	-	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	11.199.356	Januari	-
					Pebruari	-			Pebruari	2.082.950,00
					Maret	-			Maret	600.000,00
					April	-			April	449.000,00
					Mei	1			Mei	-
					Juni	1			Juni	-
					Juli	-			Juli	2.660.000,00
					Agustus	1			Agustus	360.000,00
					September	-			September	2.700.000,00
					Oktober	1			Oktober	900.000,00
					Nopember	1			Nopember	1.447.406,00
					Desember	-			Desember	-
<b>Total</b>									<b>299.962.780</b>	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)			
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target		Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ESELON III</b>											
<b>KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b>											
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sarpras kedaruratan yang sesuai ketentuan	Dokumen	4	Januari		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Kota	230.257.900	Januari	54.237.524	
					Pebruari				Pebruari	-	
					Maret	1			Maret	-	
					April				April	44.543.790	
					Mei				Mei	-	
					Juni	1			Juni	-	
					Juli				Juli	67.017.758	
					Agustus				Agustus	-	
					September	1			September	-	
					Oktober				Oktober	64.458.828	
					Nopember				Nopember	-	
					Desember	1			Desember	-	
		Persentase Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas yang sesuai ketentuan	Dokumen	2	Januari	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	65.723.800	Januari	12.200.000	
					Pebruari	-			Pebruari	-	
					Maret	-			Maret	-	
					April	1			April	43.200.000	
					Mei	-			Mei	-	
					Juni	-			Juni	-	
					Juli	-			Juli	2.323.800	
					Agustus	-			Agustus	-	
September	-	September	-								
Oktober	1	Oktober	8.000.000								
Nopember	-	Nopember	-								
Desember	-	Desember	-								



2	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat yang sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten, Kota	2.879.500	Januari	1.570.750
					Pebruari	1			Pebruari	-
					Maret	1			Maret	-
					April	1			April	1.010.000
					Mei	1			Mei	-
					Juni	1			Juni	-
					Juli	1			Juli	298.750
					Agustus	1			Agustus	-
					September	1			September	-
					Oktober	1			Oktober	-
					Nopember	1			Nopember	-
					Desember	1			Desember	-
		Persentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana yang sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten, Kota	669.457.671	Januari	69.574.920
	Pebruari				1	Pebruari			45.028.000	
	Maret				1	Maret			44.374.770	
	April				1	April			52.093.830	
	Mei				1	Mei			72.087.755	
	Juni				1	Juni			605.000	
	Juli				1	Juli			117.893.655	
	Agustus				1	Agustus			42.904.684	
	September				1	September			44.299.684	
	Oktober				1	Oktober			89.179.005	
	Nopember				1	Nopember			45.719.684	
	Desember				1	Desember			45.696.684	
		Pesentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	295.135.000	Januari	33.792.172
	Pebruari				1	Pebruari			16.463.212	
	Maret				1	Maret			16.463.212	
	April				1	April			22.645.066	
	Mei				1	Mei			16.360.528	
	Juni				1	Juni			-	
	Juli				1	Juli			53.428.643	
	Agustus				1	Agustus			16.463.212	
	September				1	September			16.463.212	
	Oktober				1	Oktober			75.375.951	
	Nopember				1	Nopember			13.839.896	
	Desember				1	Desember			13.839.896	

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang sesuai ketentuan	Laporan	12	Januari	1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	10.213.750	Januari	6.519.063		
					Pebruari	1			Pebruari	-		
					Maret	1			Maret	-		
					April	1			April	3.694.687		
					Mei	1			Mei	-		
					Juni	1			Juni	-		
					Juli	1			Juli	-		
					Agustus	1			Agustus	-		
					September	1			September	-		
					Oktober	1			Oktober	-		
					Nopember	1			Nopember	-		
					Desember	1			Desember	-		
					<b>Total</b>							<b>1.273.667.621</b>
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)					
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>ESELON III</b>												
<b>KABID REHABILITASI DAN REKONTRUKSI</b>												
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Laporan	12	Januari	1	Penanganan Pascabencana Kabupaten, Kota	130.000.000	Januari	8.524.141		
					Pebruari	1			Pebruari	14.737.861		
					Maret	1			Maret	9.229.631		
					April	1			April	16.422.639		
					Mei	1			Mei	5.234.947		
					Juni	1			Juni	-		
					Juli	1			Juli	33.382.523		
					Agustus	1			Agustus	6.514.131		
					September	1			September	6.514.131		
					Oktober	1			Oktober	16.411.737		
					Nopember	1			Nopember	6.514.131		
					Desember	1			Desember	6.514.128		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Laporan	12	Januari	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Kota	145.100.000	Januari	4.135.000		
					Pebruari	1			Pebruari	14.103.400		
					Maret	1			Maret	2.625.000		
					April	1			April	312.754		
					Mei	1			Mei	-		

					Juni	1			Juni	-		
					Juli	1			Juli	6.000.000		
					Agustus	1			Agustus	-		
					September	1			September	111.182.246		
					Oktober	1			Oktober	4.120.600		
					Nopember	1			Nopember	1.110.000		
					Desember	1			Desember	1.511.000		
Total								275.100.000				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab	
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Bulan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>ESELON IV</b>												
<b>Kasubag Umum dan Keuangan</b>												
1	Terlaksananya administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					November	1						
					Desember	1						

2	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Jumlah laporan administrasi BMD	laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					November	1						
					Desember	1						
3	Terlaksananya administrasi perkantoran	Jumlah laporan administrasi perkantoran	Laporan	12	Januari	1						
					Pebruari	1						
					Maret	1						
					April	1						
					Mei	1						
					Juni	1						
					Juli	1						
					Agustus	1						
					September	1						
					Oktober	1						
					November	1						
					Desember	1						

Singaraja, 26 Oktober 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Buleleng



**PUTU ARIADI PRIBADI, S.STP, M.A.P**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19801212 199912 1 001